BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis hasil dan pembahasan, maka peneliti memperoleh kesimpulan bahwa:

- 1. Perkembangan penerimaan pajak daerah kabupaten/kota Flores Timur pada tahun 2015-2017 cenderung mengalami peningkatan, namun belum mencapai target yang di tetapkan. Penerimaan pajak daerah kabupaten/kota Flores Timur dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2015-2017, yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp. 7.966.719.690,00, tahun 2016 sebesar Rp. 9.617.825.831,00 dan di tahun 2017 sebesar 11.058.952.625,60.
- 2. Perkembangan penerimaan retribusi daerah kabupaten/kota Flores Timur pada tahun 2015-2017 cenderung mengalami fluktuasi, namun belum mencapai target yang di tetapkan. Penerimaan retribusi daerah kabupaten/kota Flores Timur dalam kurun waktu 3 tahun dari tahun 2015-2017, yaitu pada tahun 2015 sebesar Rp. 19.816.732.991,00, di tahun 2016 sebesar Rp. 20.339.276.353,00 dan di tahun 2017 sebesar 20.211.955.673,00.
- 3. Berdasarkan perhitungan proyeksi potensi penerimaan pajak Daerah Kabupaten Flores Timur pada tahun berikutnya akan terjadi kenaikan 17% dan potensi penerimaan retribusi Daerah Kabupaten Flores Timur pada tahun berikutnya akan terjadi kenaikan 4%.

4. Faktor faktor yang mempengaruhi penerimaan Pajak daerah dan Retribusi daerah di kabupaten Flores Timur adalah Pendapatan Perkapita, dan jumlah Penduduk.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka dapat di berikan saran antara lain:

- 1. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai pajak daerah dan retribusi daerah harus lebih di galakkan agar terciptanya kesadaran kolektif sehingga masyarakat menjalankan kewajibanya demi meningkatkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota Flores
- Lebih di tingkatkan lagi fungsi kontrol dari pemerintah terhadap instansi terkait demi terciptanya kinerja yang lebih baik lagi sehingga untuk tahun-tahun selanjutnya dapat memberikan hasil dari penerimaan pajak dan retribusi daerah yang lebih optimal.
- 3. Pemerintah kabupaten/kota Flores Timur khususnya dinas yang terkait harus mengikuti prosedur yang ada dan lebih tegas terhadap wajib pajak melalui pemberiaan sanksi hukum yang tegas bagi yang melanggar.
- 4. Pemerintah Kabupaten Flores Timur perlu meningkatkan infrastuktur dan sarana prasarana utnuk menunjang pertumbuhan pendapatan daerah dan perlu adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan pemerintah setempat, seperti pengenalan objek wisata, pameran-pameran budaya, membuat tempat kuliner, perkembangan kegiatan-kegiatan ekonomi sehingga meningkatkan PAD khususnya sektor pajak dan retrib

DAFTAR PUSTAKA

- Bastian, indra. 2001, *Akuntansi Sektor Publik di Indonesia* Edisi Pertama, BPFE, Yogyakarta.S.
- Brotodihardjo, R Santoso. 2013. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Devano dan Rahayu. 2006. Perpajakan : Konsep, Teori dan Isu. Jakarta : Kencana Prenada Media Group.
- Halim.Abdul & Theresia Damayanti. 2007, Pengelolaan Keuangan Daerah seri Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah, Edisi Kedua, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Halim, Abdul. 2007, Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta.
- Halim, Abdul & Kasufi, Muhammad Syam. 2014 Akuntansi Keuangan Daerah, Salemba Empat, Jakarta
- Kuncoro, Mudrajad. 2004, Otonomi dan Pembangunan Daerah, Erlangga, Jakarta
- Mardiasmo. 2013. Perpajakan. Yogyakarta: C. V Andi Offset.
- Mahmudi. 2010, Manajemen Keuangan Daerah, Erlangga, Jakarta.
- Mahmudi.2007, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, STIE YKPN, Edisi Pertama, Yogyakarta.
- Mardiasmo. 2004, Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah, Andi Yogyakarta.
- Mahmudi. 2010. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi
- Mardiasmo.2013. perpajakan. Yogyakarta: C.V Andi offset.
- Nordiawan, Dedi. 2006, *Akuntansi Sektor Publik*, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 7 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintah*.

- Peraturan Daerah Kota Kupang No. 5 Tahun 2011 tentang *Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan*.
- Rosdiana, Haula. 2012.pengantar Ilmu Pajak: Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. Jakarta. PT. RajaGrafindo.
- Sari, Diana. 2013. Konsep Dasar Perpajakan. Bandung: PT Refika Aditama.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2016. *Pajak daerah dan Retribusi Daerah*. Jakarta:PT. Rajagrafindo Persada
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Zain, Mohammad. 2010. Manajemen Perpajakan. 2007. Jakarta: Salemba Empat